

KONSTRUKSI REALITAS PEMBUBARAN FRONT PEMBELA ISLAM DAN DEMOKRASI DALAM SURAT KABAR ONLINE

Rina Sovianti

Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Indonesia
rina.sovianti@dsn.ubharajaya.ac.id

Abstract

This study aims to know the direction of democracy and know the framing of news in Republika.com and Kompas.com, as well as the implications of the dissolution of FPI to development communication. The uniqueness of this research, FPI is a mass organization with a large number of masses but does not have an organizational license. This study uses the paradigm of constructionism, which considers the reality of social life is not a natural reality. Using the Robert N. Entman method to frame news stories coming from Republika.com and Kompas.com. The difference in framing in Kompas.com media and Republika.com is the news source. Republika.com choose a news source from an Islamic background, while Kompas.com choose a news source who is competent in his field is not based on his religion. In the first framing analysis, the level of problem identification and causal interpretation, the two online media have similarities. However, in terms of moral evaluation and treatment recommendation both media have differences. In Republika.com researchers analyzed treatment recommendations is the rejection of FPI activities. FPI has no legal standing. Kompas.com, his treatment recommendation consideration of the dissolution of FPI is to maintain the existence of ideology and basic consensus of the state of Pancasila, the 1945 Constitution, the integrity of the Republic of Indonesia, and Bhinneka Tunggal Ika. Basically, the right to organize is a constitutional right. If there is no fundamental reason, the dissolution of a community organization should not exist. However, FPI is an organization that offers intolerance in the religious field.

Keywords: : FPI; Democracy; Disbandment of FPI, Framming Media

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui arah demokrasi dan mengetahui pembingkai berita di Republika.com dan Kompas.com, serta implikasi pembubaran FPI terhadap komunikasi pembangunan. Keunikan penelitian ini, FPI merupakan organisasi massa dengan jumlah massa banyak tetapi tidak mempunyai ijin organisasi. Penelitian ini menggunakan paradigma konstruksionisme, yang memandang realitas kehidupan social bukanlah realitas yang natural. Menggunakan metode Robert N. Entman untuk membingkai berita-berita berasal dari Republika.com dan Kompas.com. Perbedaan *framing* pada media Kompas.com dan Republika.com adalah narasumber berita. Republika.com memilih narasumber berita berlatar belakang agama Islam, sedangkan Kompas.com memilih narasumber berita yang berkompeten dalam bidangnya tidak berdasarkan pada agamanya. Dalam analisis *framing* yang pertama, *level problem identification* dan *causal interpretation*, kedua media online tersebut mempunyai persamaan. Namun, dalam hal *moral evaluation* dan *treatment recommendation* kedua media mempunyai perbedaan. Pada Republika.com peneliti menganalisis *treatment recommendation* adalah penolakan kegiatan FPI. FPI tidak mempunyai *legal standing*. Kompas.com, *treatment recommendation*-nya pertimbangan pembubaran FPI adalah menjaga eksistensi ideologi dan konsensus dasar bernegara Pancasila, UUD 1945, keutuhan NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Pada dasarnya hak berorganisasi adalah hak konstitusional. Jika tidak ada alasan mendasar, pembubaran sebuah organisasi kemasyarakatan seharusnya tidak ada. Namun, FPI merupakan organisasi yang menawarkan intoleransi dalam bidang keagamaan.

Kata Kunci: : FPI; Demokrasi; Pembubaran FPI, Framming Media

PENDAHULUAN

Berita kepulangan Rizieq Shihab menjadi *booming* di media-media di Indonesia. Rizieq Shihab adalah pendiri Front Pembela Islam yang disingkat FPI. FPI mempunyai pengikut yang banyak dari berbagai kota di Indonesia karena perjuangannya menegakkan hukum Islam di negara sekuler. FPI didirikan pada 17 Agustus 1998 di Pondok Pesantren Al Um, Kampung Utan, Ciputat, di Selatan Jakarta oleh sejumlah Habaib, Ulama, Mubaligh dan Aktivis Muslim dan ratusan santri yang berasal dari daerah Jabotabek.

Kepulangan Rizieq Shihab dari Mekah setelah tiga setengah tahun berada di Mekkah sangat dinantikan oleh pengikutnya. Berita kepulangan Rizieq Shihab ke tanah air membuat antusias pengikutnya untuk memberikan ucapan selamat datang dan menyambut kedatangannya. Pengikutnya menganggap Rizieq Shihab adalah keturunan Nabi Muhammad SAW, sehingga Rizieq Shihab sangat dielu-elukan oleh para pengikutnya. Apapun yang dikatakan oleh Rizieq Shihab sangat dipercaya oleh pengikutnya. Bukti bahwa segala tindak tanduk Rizieq Shihab sangat dipercaya oleh pengikutnya yaitu pada pemilihan gubernur DKI Jakarta. Rizieq Shihab sangat berperan dalam membantu memperoleh suara untuk Anis Baswedan melawan Basuki Tjahaya Purnama. FPI dengan kekuatannya berkampanye melalui agama di masjid-masjid. Agama menjadi alat kampanye untuk Anis Baswedan dan FPI dan menjadi kekuatan yang utama. Anis baswedan yang didukung FPI akhirnya memenangkan pemilihan gubernur DKI Jakarta.

Pada masa Covid 19, Laskar FPI berkumpul tanpa mengindahkan protokol kesehatan seperti yang dianjurkan pemerintah. Berkumpulnya pengikut dalam jumlah besar mengakibatkan bertambahnya orang yang terkena virus Covid 19 dan membentuk kluster baru penularan kepada orang lain.

Hal tersebut yang mengakibatkan Rizieq Shihab dijadikan tersangka penyebaran virus Covid 19. Di samping pembentukan kluster baru di bandara, Rizieq Shihab juga mengadakan Maulud Nabi Muhammad dan mengadakan acara pernikahan anaknya yang menyebabkan terjadinya kerumunan banyak orang. Hal itulah yang menyebabkan Rizieq Shihab menjadi tersangka yang menyebabkan orang lain tertular virus Covid 19.

Di samping itu, pihak FPI juga tidak menyetujui jika baliho-baliho menyambut kepulangan Rizieq Shihab diturunkan oleh TNI. Pihak FPI memasang kembali baliho-baliho yang sudah diturunkan. Adapun baliho-baliho tersebut tidak mempunyai ijin pemasangannya dan peletakan baliho-baliho tersebut mengganggu ketertiban umum.

Pemberitaan mengenai pelarian Rizieq Shihab setelah kepulangannya dari Mekkah banyak diliput oleh media di Indonesia. Setelah kepulangan Rizieq Shihab, FPI membuat kegiatan yang meresahkan masyarakat pada umumnya dengan tidak memperhatikan protokol kesehatan. Oleh karena itu, sebagai pimpinan tertinggi FPI, Rizieq Shihab dijadikan tersangka karena tidak mengindahkan protokol kesehatan di masa pandemic. Pihak kepolisian melayangkan surat panggilan tetapi tidak diindahkan oleh Rizieq Shihab. Untuk menghindari masalah hukum yang membelitnya, Rizieq Shihab melarikan diri di daerah Cirebon menurut versi pemerintah. Dalam pelariannya tersebut, pihak kepolisian berhasil mengikutinya dan kemudian terjadilah peristiwa tembak menembak antara pihak kepolisian dengan pihak FPI. Tembak-menembak tersebut mengakibatkan tewasnya enam orang dari pihak FPI. Namun, pihak FPI mengklaim bahwa pihaknya tidak membawa senjata api maupun senjata tajam. Berbeda dengan klaim FPI, pihak kepolisian menemukan adanya senjata api dan senjata tajam di dalam mobil FPI. Bermula dari pemasangan kembali baliho yang bergambar

Rizieq Shihab serta ditemukan senjata tajam dan senjata api lalu bergulir wacana pembubaran FPI karena terkait dengan teroris.

Berbagai masalah yang menimpa Rizieq Shihab mulai dari insiden Monas, aksi 212, skandal mesum, dan yang terakhir kepulauan Rizieq Shihab yang menimbulkan polemik. Adanya berbagai masalah yang mengakibatkan terganggunya ketertiban dan keamanan masyarakat umum tersebut mengakibatkan pihak kepolisian menyampaikan surat pemanggilan kepada Rizieq Shihab. Pemanggilan pertama Rizieq Shihab mangkir. Kemudian dilakukan pemanggilan yang kedua juga mangkir. Pemanggilan yang ketiga kali akhirnya pihak kepolisian memperingatkan akan ada penjemputan jika pada pemanggilan ketiga Rizieq Shihab tidak hadir juga. Pada pemanggilan ketiga akhirnya Rizieq Shihab bersedia hadir tanpa ada penjemputan.

Melihat sepak terjang Rizieq Shihab sebagai pemimpin FPI jauh menyimpang dari ajaran agama Islam dan melanggar aturan negara. Penggunaan isu-isu politik berbasis sentimen (agama, etnis, antar golongan) selanjutnya disebut Politik Sentimen sudah tak terelakkan dalam dunia politik Indonesia (Afriadi et al., 2019). Negara Indonesia adalah negara demokrasi Pancasila. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan demokrasi Pancasila adalah Negara Indonesia berdasarkan hukum, tidak berdasarkan kekuasaan belaka dan pemerintah berdasarkan system konstitusional bukan absolutism atau kekuasaan mutlak dan tidak terbatas.

Beberapa karakteristik demokrasi Indonesia adalah sebagai berikut: kedaulatan ada di tangan rakyat; selalu berdasarkan kekeluargaan dan gotong royong, cara pengambilan keputusan melalui musyawarah untuk mufakat; tidak mengenal adanya partai pemerintahan dan oposisi; diakui adanya keselarasan antara hak dan kewajiban; menghargai hak asasi manusia;

ketidaksetujuan terhadap kebijaksanaan pemerintah dinyatakan dan disalurkan melalui wakil-wakil rakyat serta tidak menghendaki adanya demonstrasi dan pemogokan karena merugikan semua pihak; tidak menganut system monopartai; pemilu dilaksanakan secara luber; tidak mengenal adanya dictator mayoritas dan tirani minoritas; mendahulukan kepentingan rakyat atau kepentingan umum (Djuyandi & Yusa, 2017). FPI sebuah organisasi yang tidak memiliki badan hukum karena telah dibatalkan dan pihak FPI tidak bersedia memperpanjang karena terdapat syarat-syarat yang tidak disetujui oleh pihak FPI dan menganggap bahwa pemerintah adalah thoghut. Thaghut atau tagut adalah istilah dalam agama Islam yang merujuk pada penyembahan selain Allah.

Sejak awal kelahirannya hingga saat ini, aktivitas-aktivitas FPI banyak menghiiasi media massa di Indonesia karena kekerasan yang dilakukannya (Faiz, 2017). Berbagai media memframing melalui berbagai pemberitaan FPI sebagai organisasi masyarakat yang menyulut terjadinya konflik (Akhrani, 2018). Begitu sulitnya FPI dibubarkan sekalipun telah memiliki catatan hitam dan memunculkan asumsi bahwa Gerakan FPI adalah karena pesanan Penguasa, mereka yang melakukan tindak kekerasan atas perintah-pesanan dari orang-orang yang tadinya memegang kekuasaan. Dengan demikian, kalangan-kalangan itu memiliki tujuan menghadang proses demokratisasi dan menggunakan kelompok kaum muslimin untuk membela kepentingan orang-orang tersebut atas nama Islam. FPI sering tidak melakukan mekanisme perijinan terhadap aparat kepolisian dan sering juga ketika FPI melakukan aksinya, mereka ini yang memulai memancing emosi pihak kepolisian. Tidak ada kebijakan yang signifikan yang diberikan kepada FPI dari aparat kepolisian apa lagi sampai membubarkan FPI. Ini menunjukkan posisi sulit polisi karena hanyalah aparat di bawah kekuasaan (Wahid, 2018). Emosi juga dapat

digunakan untuk tujuan anti-pluralis karena dapat menyebabkan fragmentasi dalam masyarakat dan dapat merusak kohesi sosial, terutama di negara-negara dengan beragam budaya dan komposisi agama (Duile, 2017). Konflik yang melibatkan agama dapat disebabkan oleh beberapa hal, secara keseluruhan disebabkan oleh sentimen atau aspek emosional keagamaan (Savitri & Taher, 2018).

Konteks penelitian dalam penelitian ini adalah banyaknya kasus yang menimpa Rizieq Shihab dan FPI, maka bergulirlah berita-berita mengenai pembubaran FPI. Pembubaran FPI tersebut menjadi berita yang strategis yang dibingkai oleh masing-masing media. Media membingkai berbagai berita pembubaran FPI sebagai yang layak “dijual” kepada pembacanya. Pembubaran FPI berkaitan dengan demokrasi di mana masing-masing orang diakui dalam memberikan suaranya. Namun, berkaitan dengan FPI sedikit unik karena organisasi dengan jumlah massa yang banyak tetapi tidak mempunyai ijin sebagai organisasi akan tetapi masih berkegiatan seperti layaknya organisasi masyarakat yang mempunyai ijin. Ijin FPI tidak diperpanjang karena FPI belum memenuhi salah satu syarat sebagai organisasi masyarakat yaitu AD/ART dan dengan berbagai pertimbangan akhirnya pemerintah berhasil membubarkan FPI. Setelah melewati berbagai proses hukum, kini Rizieq Shihab sebagai ketua FPI akhirnya ditetapkan sebagai tersangka atas berbagai kasus dan kini masih di dalam jeruji penjara.

Pembubaran terhadap organisasi kemasyarakatan dengan keanggotaan yang jumlahnya cukup besar memberi dampak yang luas terhadap masyarakat, organisasi itu sendiri, dan pemerintah. Hal tersebut tergambar dari media-media yang menyebutkan bahwa pembubaran FPI akan menjadi preseden yang buruk bagi demokrasi. FPI adalah organisasi kemasyarakatan yang menganut keradikalan dalam beragama. Radikal akan mengancam

demokrasi sementara demokrasi akan meminggirkan radikalisme. Radikalisme beragama yang diekspresikan FPI lewat jalur kekerasan memang mengancam masa depan demokrasi. Pembubaran FPI yang dilakukan tidak melalui mekanisme pengadilan, sangat dekat dengan pelanggaran hak kebebasan berkumpul dan berserikat. Ketidakjelasan batas dari aksi pembubaran FPI berpotensi merenggut hak sipil dan hak politik warga negara. Aksi-aksi kekerasan FPI memang tidak sesuai dengan prinsip masyarakat sipil yang menjunjung tinggi nilai pluralitas, toleransi, dan egalitarian.

Dalam penelitian Ramadan Hendrian menghasilkan penelitian aksi sweeping yang dilakukan oleh FPI dan penegakan amar ma'rûf nahî munkar yang berujung pada kekerasan dengan masyarakat sekitar dalam kehidupan demokrasi di Indonesia. Demikian juga dengan penelitian Silviah (2014) yang meneliti mengenai kekerasan yang dilakukan oleh FPI dalam melaksanakan kegiatannya. Melihat kedua penelitian tersebut, kebaruan dari penelitian yang peneliti lakukan adalah melihat arah demokrasi Indonesia dengan adanya wacana pembubaran FPI sebagai organisasi masyarakat (Hendrian, 2020).

Tujuan penelitian ini, peneliti ingin mengetahui arah pembingkai berita pembubaran FPI oleh pemerintah di media online *Republika.com* dan *Kompas.com*. Pembingkai tersebut berkaitan dengan arah demokrasi di Indonesia. Pengetahuan apa yang diperoleh dari pembingkai berita tersebut dan juga kontribusinya kepada komunikasi pembangunan secara luas.

Untuk melihat arah demokrasi pada pembubaran FPI, peneliti menggunakan analisis framing Robert N. Entman. Analisis framing adalah analisis untuk mengetahui bagaimana realitas (peristiwa, actor, kelompok) dibingkai oleh media. Pembingkai melalui proses konstruksi. Realitas social dimaknai dan dikonstruksi dengan makna tertentu, artinya bagaimana suatu peristiwa dimaknai dan ditampilkan oleh media.

Menurut Erving Goffman secara sosiologis konsep *frame analysis* memelihara kelangsungan kebiasaan kita mengklasifikasi, mengorganisasi dan menginterpretasi secara aktif pengalaman-pengalaman hidup kita untuk dapat memahaminya. Schemata interpretasi itu disebut frames, yang memungkinkan individu dapat melokalisasi, merasakan, mengidentifikasi dan memberi label terhadap peristiwa-peristiwa serta informasi (Sobur, 2012).

Robert N. Entman adalah salah seorang ahli yang meletakkan dasar-dasar bagi analisis *framing* untuk studi isi media dalam hal ini berkaitan dengan paradigma komunikasi.

Entman membagi framing dalam dua dimensi besar, yaitu seleksi isu dan penekanan (penonjolan) aspek-aspek realitas. Kedua faktor tersebut dapat mempertajam pembingkaiian berita melalui proses seleksi isu yang layak ditampilkan dan penekanan berita. Jurnalis atau wartawan mempunyai factor yang paling menentukan fakta yang dipilihnya, ditonjolkan, atau pun dibuang. Pengambilan keputusan mengenai sisi mana yang harus ditonjolkan atau dibuang merupakan keputusan yang melibatkan nilai dan ideologi para jurnalis yang terlibat proses produksi suatu berita.

Penonjolan merupakan proses membuat informasi menjadi lebih bermakna. Realitas yang disajikan secara menonjol mempunyai peluang untuk diperhatikan dan mempengaruhi khalayak dalam memahami realitas. Pembingkaiian atau framing yang dijalankan suatu media dengan menyeleksi topik atau isu tertentu dan mengabaikan topik/isu yang lain, menonjolkan isu tersebut dengan menggunakan pelbagai strategi wacana (menempatkan sebagai headline, halaman depan, tengah, atau belakang), pengulangan, pemakaian grafis untuk mendukung dan memperkuat penonjolan, pemakaian label tertentu ketika menggambarkan orang atau peristiwa yang diberitakan.

Pola penonjolan sebagai upaya menyuguhkan kepada publik tentang pandangan tertentu agar pandangannya lebih diterima oleh publik. Menurut Entman penonjolan merupakan sebuah produk interaksi antara teks dan penerima, kehadiran frame atau bingkai di dalam teks tidak menjamin pengaruhnya terhadap pemikiran khalayak. Selanjutnya Entman mengatakan bahwa pembingkaiian memiliki implikasi penting bagi komunikasi politik, karena menuntut perhatian terhadap beberapa aspek dari realitas dengan mengabaikan elemen-elemen lainnya yang memungkinkan khalayak memiliki rekasi yang berbeda. Politisi korup membangun pembingkaiian dengan melempar isu yang dianggap lebih penting sehingga media melakukan penonjolan terhadap isu yang dilempar oleh politisi tersebut. Politisi bersama jurnalis membangun frame berita (Sobur, 2012).

Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pembubaran FPI tersebut mempengaruhi pemberitaan; bagaimana realitas demokrasi; bagaimana arah demokrasi di Indonesia dengan adanya pembubaran FPI; bagaimana tindakan pemangku kepentingan dalam menangani pembubaran FPI; dan bagaimana implikasi berita pembubaran FPI dengan komunikasi pembangunan. Dari perumusan masalah diatas maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui arah demokrasi dan mengetahui pembingkaiian berita di *Republika.com* dan *Kompas.com*, serta implikasi pembubaran FPI terhadap komunikasi pembangunan.

METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Peneliti menggunakan data yang dikumpulkan melalui media online, yaitu *Republika.com* dan *Kompas.com* mengenai pembubaran FPI kemudian dianalisis menggunakan konsep framing dari Robert N. Entman. Hal tersebut diambil peneliti karena peneliti ingin melihat bagaimana pembubaran FPI tersebut mempengaruhi pemberitaan di *Republika.com* dan *Kompas.com*, bagaimana gambaran realitas

demokrasi di Media Republika.com dan Kompas.com, bagaimana arah pembingkai berita di Republika.com dan Kompas.com, bagaimana arah demokrasi di Indonesia dengan adanya pembubaran FPI, bagaimana tindakan pemangku kepentingan dalam menangani pembubaran FPI, dan bagaimana implikasi berita pembubaran FPI dengan komunikasi pembangunan. Peneliti menggunakan analisis *framing* kedua media yaitu Republika.com dan Kompas.com untuk menjawab pertanyaan penelitian tersebut.

Framing merupakan pendekatan untuk mengetahui bagaimana perspektif atau cara pandang yang digunakan oleh wartawan ketika menyeleksi isu dan menulis berita. Cara pandang atau perspektif pada akhirnya yang menentukan fakta apa yang diambil, bagian mana yang ditonjolkan dan dihilangkan, dan hendak dibawa ke mana berita tersebut (Eriyanto, 2012). Pembingkai tersebut yang diteliti untuk mendapatkan perbedaan antara media online Republika.com yang berideologi Islam dan Kompas.com yang berideologi nasionalis. Untuk melihat bagaimana media Republika.com dan Kompas.com dalam membingkai berita FPI dan isu pembubaran organisasi tersebut serta arah demokrasi dari sudut pandang masing-masing media tersebut.

Peneliti memilih berita di kedua media online tersebut yang sesuai dengan topik penelitian. Setelah memilih berita, kemudian peneliti menganalisis dengan menggunakan analisis *framing* untuk membingkai berita-berita yang telah peneliti dapatkan sesuai dengan konsep *framing* dari Robert N. Entman.

Pengumpulan data adalah kegiatan peneliti dalam upaya mengumpulkan sejumlah data lapangan yang diperlukan untuk menjawab pertanyaan penelitian. Pada penelitian ini peneliti mengumpulkan berita-berita yang berkaitan dengan FPI dari Republika.com dan Kompas.com lalu dipilih sesuai dengan topik penelitian. Setelah dipilih dan ditetapkan berita yang mana yang

dijadikan data lalu dianalisis menggunakan analisis *framing* dari Robert Entman.

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan *purposive sampling* di mana peneliti memilih berita berkaitan dengan topik penelitian pada kedua media online, yaitu Republika.com dan Kompas.com. Menggunakan *purposive sampling* dengan pertimbangan banyaknya judul berita mengenai pembubaran FPI. Penulis memilih isi berita yang mempunyai persamaan di kedua media online tersebut.

Peneliti melakukan analisa data secara deskriptif analisis kualitatif. Selanjutnya menggunakan pendekatan induktif, yaitu dengan menarik dari hal-hal khusus ke umum. Adapun pengolahan data menggunakan konsep analisis *framing* Robert N. Entman. Cara kerjanya, data yang berhasil diperoleh kemudian dianalisa secara bertahap dalam pengumpulan dan pengolahan data. Setelah data-data terhimpun dan selesai diolah, proses selanjutnya adalah dengan melakukan analisis secara berlapis.

Entman menyoroti *framing* dalam dua dimensi besar, yaitu seleksi isu dan penekanan aspek-aspek tertentu dari realitas atau isu. *Framing* adalah pendekatan yang digunakan oleh wartawan ketika menyeleksi isu dan menulis berita, bagian mana yang ditonjolkan dan dihilangkan. Cara pandang seperti itulah yang akhirnya menentukan fakta yang diambil.

Konsep *framing* Entman meliputi empat elemen sebagai berikut: Pertama, *Define Problems* (Pendefinisian masalah), Elemen ini merupakan bingkai utama yang menekankan bagaimana peristiwa dimaknai secara berbeda oleh wartawan, setiap wartawan memiliki perspektif berbeda. Kedua, *Diagnose cause* (Memperkirakan penyebab masalah), Elemen ini digunakan untuk membingkai siapa yang dianggap sebagai actor dari suatu peristiwa. Elemen ini bisa berupa (*what*) dan (*who*). Artinya bagaimana peristiwa itu dipahami menentukan apa dan siapa yang dianggap

sebagai sumber masalah. Masalah yang dipahami secara berbeda, maka penyebab masalahnya akan dipahami berbeda juga. Pendefinisian sumber masalah ini menjelaskan siapa yang dianggap sebagai pelaku dan siapa yang menjadi korbannya. Ketiga, *Make moral Judgement* (Membuat keputusan moral), Elemen ini merujuk pada nilai moral apa yang dipakai untuk melegitimasi suatu tindakan dalam peristiwa tersebut dengan mengedepankan nilai moral, elemen ini digunakan untuk membenarkan dan memberikan penilaian atas peristiwa yang terjadi. Keempat, *Treatment recommendation* (Menekankan penyelesaian), elemen ini digunakan untuk menilai apakah yang akan dipilih wartawan untuk menyelesaikan masalah. Penyelesaian ini sangat tergantung bagaimana peristiwa dapat dilihat dan siapa yang dipandang sebagai penyebab masalah (Eriyanto, 2012).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Proses Demokrasi Dan Media

Demokrasi berasal dari bahasa Yunani Kuno, terdiri dari dua kata yaitu *demos* berarti rakyat dan *kratos* yang berarti kekuasaan atau pemerintahan. Definisi menurut Abraham Lincoln adalah suatu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat (Djuyandi & Yusa, 2017). Henry B. Mayo dalam buku *Introduction to Democratic Theory* mendefinikan sebagai berikut system politik yang demokratis adalah kebijaksanaan ditentukan atas dasar mayoritas oleh wakil-wakil yang diawasi secara efektif oleh rakyat dalam pemilihan-pemilihan berkala yang didasarkan atas prinsip kesamaan politik dan diselenggarakan dalam suasana terjaminnya kebebasan politik (Miriam, 2016).

Sebagaimana definisi-definisi tersebut di atas rakyat adalah pemegang kedaulatan yang utama. Menurut Lincoln pemerintah dalam menjalankan tugasnya agar mengedepankan kepentingan rakyat dalam setiap keputusan dan kebijakan yang

dijalankannya. Selanjutnya menurut Mayo dengan terjaminnya kebebasan politik sehingga wakil-wakil rakyat bisa diawasi oleh rakyat.

Demokrasi mengansumsikan adanya keadaan terbuka di mana rakyat diberikan kebebasan untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, media memberikan akses kepada rakyat, dan jaringan informasi lain yang memungkinkan terjadinya advokasi (McNair, 2015).

McNair juga menyoroti lima fungsi media komunikasi dalam masyarakat demokrasi yang merupakan tipe ideal bagi masyarakat. Kelima fungsi tersebut adalah: Pertama, *To inform*, artinya fungsi-fungsi tersebut harus menginformasikan warga tentang apa yang terjadi di sekitar mereka. Kedua, *To educate*, artinya fungsi-fungsi tersebut memberi edukasi mengenai makna dan signifikansi fakta. Fungsi ini penting untuk dilaksanakan karena melalui fungsi ini dijelaskan keseriusan jurnalis dalam melindungi obyektivitasnya karena nilai wartawan sebagai educator mengansumsikan kenetralan professional dari persoalan-persoalan yang dianalisis.

Ketiga, Media harus menyediakan *platform* bagi wacana politik *public*, memfasilitasi pembentukan opini *public* dan menyampaikan kembali opini tersebut kepada *public* yang memberikan opini itu. Keempat, Memberikan publisitas bagi institusi pemerintah dan lainnya. Dalam hal ini media berfungsi sebagai *watchdog*. Kelima, Sebagai saluran bagi dukungan atas pandangan-pandangan politik (McNair, 2015)

Fungsi-fungsi tersebut jika berlaku pada kondisi ideal masyarakat, namun banyak ketidak idealnya yang terjadi di masyarakat pada umumnya. Berbagai anomali dapat terjadi di masyarakat seperti penyuaan jurnalis agar tidak dimuat berita yang negatif bagi suatu organisasi atau perorangan. Hal tersebut di atas merupakan tipe ideal hubungan media dan proses demokrasi. Namun, pada kenyataannya

sering terganjal oleh media-media yang menyajikan berita tidak sesuai fakta atau jurnalis-jurnalis yang terbelenggu oleh idealism dan kepentingan mereka sendiri.

Media Online

Berita surat kabar merupakan suatu dokumen cetak atas segala hal yang dikatakan orang lain dan hasil rekaman peristiwa yang ditangkap oleh jurnalis untuk kemudian dituangkan kedalam suatu bentuk tulisan, gambar, foto dan lain sebagainya (Rizky, 2012). Peneliti mengambil data dari berita surat kabar yang ada di internet.

Di era yang serba digital sedang menyongsong masyarakat industri berbasis 4.0, kemudian informasi menjadi sangat layak guna dikonsumsi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, terutama pada sisi-sisi aktivitas manusia yang menarik untuk diikuti maupun sekedar diketahui. Berbagai hal yang ingin dibaca ada didalam beberapa kategori-kategori besar yang sudah sering kita ikuti di media-media massa didalamnya terdapat daring atau online pada jagat internet (Pranawukir, 2019).

Di dalam buku *Jurnalistik Online* karangan Romli memuat bahwa media online adalah media generasi ketiga setelah media cetak (seperti koran dan tabloid), dan media elektronik (radio dan televisi). Media online merupakan produk jurnalistik online yang melakukan pelaporan fakta atau peristiwa yang diproduksi dan distribusikan melalui internet. Dalam komunikasi massa, media online merupakan objek kajian baru melalui teori "*new media*". Media baru tersebut mengacu pada permintaan akses kapan saja, di mana saja, pada setiap perangkat digital serta umpan balik pengguna interaktif, partisipasi kreatif, dan pembentukan komunitas sekitar konten media, juga aspek generasi "*real time*" (Romli, 2012).

Media online memiliki beberapa karakteristik diantaranya sebagai berikut: (1), Kecepatan Informasi Peristiwa / kejadian yang terjadi di lapangan dapat di upload

secara langsung dalam hitungan menit atau detik. (2), Informasi Bisa Di-*Update Updating* informasi bisa dikerjakan dengan mudah serta cepat, baik berupa perbaikan isi, data dan tata bahasa, ataupun berupa perkembangan terbaru sebuah isu atau momen. (3), Berinteraksi dengan *audience* Salah satu kelebihan media online adalah fungsi interaktif. Berbagai fitur media online seperti email, chat, games online, dan survey. (4), Personalisasi Pengguna atau pembaca bisa memutuskan informasi mana yang diperlukan. (5), Kapasitas Muatan Dapat Ditambah Tiap-tiap informasi media disupport oleh penyimpanan data yang ada di *server* komputer. Informasi yang sudah dipublikasikan, akan tetap tersimpan dan dapat ditambah kapan saja dan dapat dicari dengan mesin pencari. (6), Terhubung dengan sumber lain (*hyperlink*)

Pada media online seluruh informasi yang disampaikan bisa dihubungkan dengan sumber yang relevan, baik dari sumber yang sama maupun berbeda. Di sisi lain perkembangan teknologi informasi ditemukannya internet pada 1972 dan dibuka untuk komersial pada 1991, telah mendorong kelahiran jurnalisme online. Di mana pada akhirnya memunculkan situs media online pertama di Indonesia yaitu *Republika.co.id* pada 1995 (Sambo, 2017).

Media massa online sebagaimana seharusnya seperti media massa konvensional adalah sebuah lembaga yang bekerja secara profesional untuk memenuhi kebutuhan masyarakat atas informasi yang akurat dan melebaga di setiap harinya dengan berbagai berita yang disajikan baik berasal dari peristiwa nasional maupun internasional.

Meskipun informasi yang disajikan media massa online diragukan akurasi atau kebenarannya tetapi masyarakat sudah terlanjur menjadikannya sebagai tolak ukur terhadap kinerja pemerintahan atau permasalahan yang menyangkut tokoh masyarakat (publik figure, artis, politikus, dan lain-lain) terkait citra.

Seperti halnya pemberitaan yang terkait kasus pembubaran FPI yang marak diberitakan di media online dalam hal ini Kompas.Com dan Republika.Com di mana masing-masing media merekonstruksikan berita berdasarkan pemahaman redaksi dan disesuaikan dengan ideologi masing-masing medianya.

Pembingkaian Menentukan Realitas

Framing atau pembingkaian berita merupakan penentu bagaimana realitas berita hadir di hadapan pembaca. Apa yang diketahui oleh pembaca tergantung dari pembaca dalam melakukan pembingkaian atas suatu kejadian dan memberikan pemahaman serta pemaknaan tertentu atas suatu peristiwa. Pembingkaian atas peristiwa yang sama dapat menghasilkan pemahaman dan pemaknaan yang berbeda ketika wartawan menuliskan pandangannya dalam berita. Analisis *framing* digunakan untuk mengetahui bagaimana realitas peristiwa yang sama dikemas secara berbeda oleh wartawan sehingga menghasilkan berita yang secara radikal berbeda (Eriyanto, 2012).

Pembingkaian berita sangat ditentukan oleh wartawan dalam menulis berita. Berita apa yang disajikan oleh wartawan sangat menentukan terhadap realitas apa yang ingin dihadirkan kepada pembacanya. Media-media dalam memberitakan sebuah berita berkaitan dengan ideologi media. Ideologi media tersebut yang membentuk wartawan dalam memberitakan suatu berita. Masyarakat yang mengonsumsi berita harus pandai-pandai dalam menerjemahkan apa yang ditulis oleh wartawan. Setiap media mempunyai ciri khas sendiri-sendiri dalam mengemas beritanya.

Pada umumnya suatu peristiwa itu bersifat subyektif yang datang dari wartawan surat kabar itu sendiri dalam menilai dan menceritakan suatu fakta. Jadi disini suatu realitas tidak ada yang bersifat obyektif, karena realitas itu timbul dari konstruksi dan pandangan tertentu yang berbeda-beda

pemahamannya oleh masing-masing wartawan (Rizky, 2012).

Analisis Framing Media Online Republika.com dan Kompas.com

Penelitian ini menggunakan analisis *framing* dari Robert N. Entman. Hasil analisis *framing* dari media online Republika.com dan Kompas.com menghasilkan dua tabel yang berkaitan dengan pembubaran FPI oleh pemerintah.

Kedua berita online menyoroti pembubaran FPI, yang mengejutkan banyak pihak yang terlibat di dalamnya antara lain dari sisi FPI sendiri. Pada tabel 1, Republika.com menurunkan salah satu judul berita FPI, Pemimpin Dipolisikan, Organisasi dibubarkan yang mempunyai narasumber tidak *cover bothside*. Narasumber tersebut diwakili dari pihak pemerintah, yaitu Mahfud MD sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan dan Edward Omar Sharif Hiariej sebagai Wakil Menteri Hukum dan HAM. Jika dilihat dari judul beritanya sepertinya Republika.com akan membahas pembubaran FPI dari sudut yang berbeda dengan media online pada umumnya. Pada kenyataannya isinya sama dengan media Kompas.com atau media online lainnya. Judul yang diturunkan Republika.com berhasil membuat seolah-olah FPI pihak yang menderita akibat pembubarannya. Pada *problem identification*, Republika.com dan Kompas.com mempunyai persamaan dalam beritanya yaitu mengenai pembubaran FPI oleh pemerintah. Dalam *causal interpretation*, kedua berita online juga mempunyai kesamaan yaitu kegiatan FPI melanggar ketertiban dan keamanan. Berita di Republika.com kurang mengupas masalah pembubaran FPI dikaitkan dengan masalah ideologi negara dan konsensus dalam bernegara seperti berita yang ada di Kompas.com. Dari sini dapat dilihat jika berita yang diturunkan oleh Republika.com kurang membawa pembacanya untuk mencintai negaranya. Berbeda dengan

Kompas.com yang mengarahkan pembacanya untuk lebih mencintai NKRI.

FPI adalah organisasi kemasyarakatan dalam melaksanakan kegiatan selalu mengganggu masyarakat pada umumnya. Menurut Republika.com dalam saran penyelesaian masalah penolakan kegiatan atas nama FPI, karena organisasi tersebut tidak mempunyai legal standing. TNI akan siap sedia turun tangan apabila ada yang mengganggu kehidupan masyarakat. Setiap persoalan yang ada harus dilakukan secara hukum karena Negara Republik Indonesia berdasarkan pada hukum. Keputusan pembubaran FPI ditandatangani enam pejabat negara yaitu: Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Komunikasi dan Informatika Jhony G Plate, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, Kapolri Jendral Idham Azis, Jaksa Agung ST Burhanuddin dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Boy Rafly Amar.

Bagi pemangku kepentingan, terlihat pada tabel 2, harus bisa melihat organisasi yang bisa mengakomodir kepentingan masyarakat dan bisa menjadi saluran bagi masyarakat dalam menyatakan pendapatnya. Berbeda dengan FPI yang selalu mengganggu ketertiban umum dalam setiap kegiatannya.

Jika dikaitkan dengan demokrasi, pada dasarnya hak berorganisasi adalah hak konstitusional. Semua orang akan dihargai pendapatnya di negara demokrasi. Jika tidak ada alasan yang mendasar, pembubaran terhadap sebuah organisasi kemasyarakatan seharusnya tidak ada. Namun, FPI sebuah organisasi yang menawarkan intoleransi dalam bidang keagamaan seperti misalnya akan membuat NKRI sebuah negara yang berdasarkan pada Islam, menggunakan kekerasan dalam setiap tindakannya, dan melawan pemerintahan yang sah sehingga menyebabkan keamanan dan ketertiban terganggu.

Tabel 1. Analisis Framing 1

Analisi Framing Entman	Republika.com	Kompas.com
Judul berita	1. Pemerintah Bubarkan FPI dan Dilarang Beraktivitas 2. FPI, Pemimpin Dipolisikan Organisasi Dibubarkan 3. Tujuh Poin SKB Pelarangan Kegiatan FPI	1. Pembubaran dan Penghentian Aktivitas FPI Diputus 6 Pejabat Tinggi Negara 2. FPI Dibubarkan Pemerintah, Wartawan Diusir dari Petamburan 3. Ketidakjelasan Status Hukum FPI yang Berakhir Pembubaran
Waktu penayangan berita	Rabu, 30 Desember 2020	Rabu, 30 Desember 2020
Apa yang menjadi masalah	Pembubaran FPI oleh pemerintah	Penghentian kegiatan dan pembubaran FPI oleh pemerintah
Apa penyebabnya	Kegiatan FPI melanggar ketertiban keamanan dan kepentingan umum	, Pelanggaran kegiatan FPI
Moral concern	FPI adalah organisasi yang tidak mempunyai <i>legal standing</i> sehingga dilarang melakukan kegiatan.	Pelanggaran kegiatan FPI ini dituangkan dalam keputusan bersama enam pejabat tertinggi di kementerian dan lembaga negara.

Solusi/Saran penyelesaian	Penolakan kegiatan atas nama FPI, karena organisasi FPI tidak mempunyai <i>legal standing</i> .	Salah satu pertimbangan pembubaran dan penghentian kegiatan FPI adalah menjaga eksistensi ideologi dan konsensus dasar bernegara yaitu Pancasila, UUD 1945, keutuhan NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika.
----------------------------------	---	--

Sumber: Hasil Penelitian, 2021

Tabel 2. Analisis Framing 2

Analisis Framing Entman	Republika.com	Kompas.com
Judul berita	Soal Pembubaran FPI, Polri akan Ambil Langkah-Langkah	Puluhan Brimob-TNI Datangi Petamburan III, Copot Semua Atribut FPI
Waktu penayangan berita	Rabu, 30 Desember 2020, 18:05 WIB	Rabu, 30 Desember 2020, 16:30 WIB
Apa yang menjadi masalah	Langkah apa yang akan diambil Polri setelah pembubaran FPI belum jelas.	Pencopotan atribut FPI
Apa penyebabnya	Belum terkoordinasi mengenai tugas-tugas Polri	Masih banyak atribut FPI di markas FPI yang belum diturunkan.
Moral concern	Polri menunggu arahan tugas	Polri mengetuk pintu markas FPI sebelum melaksanakan tugas untuk meminta ijin. Namun, tidak ada jawaban dari dalam markas FPI.
Solusi/Saran penyelesaian	Polri akan mengambil langkah-langkah sesuai dengan tugas pokoknya.	Pemerintah melarang aktivitas FPI dan akan menghentikan setiap kegiatan yang dilakukan FPI.

Sumber: Hasil Penelitian, 2021

Berita Kompas.com lebih *up to date* dibanding Republika.com jika dilihat waktu penayangan berita tersebut, pihak Kompas.com sudah mengeluarkan berita mengenai langkah-langkah yang harus diambil oleh Polri yaitu pencopotan atribut FPI. Hal tersebut dilakukan Polri bekerjasama dengan Brimob. Berbeda dengan Republika.com, Republika.com menurunkan berita dalam rentang atau jeda waktu yang lebih lama dari Kompas.com. Sumber berita di Kompas.com lebih *cover both side* artinya dari kedua belah pihak yaitu pihak FPI dan pihak pemerintah ada. Kompas.com menurunkan narasumber dari

FPI yaitu Sugito Atmo Prawiro sebagai Ketua Bantuan Hukum FPI. Ada pun dari pihak pemerintah diwakili oleh Menteri Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD. Republika.com menurunkan sumber berita Menteri Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD. Kompas.com ingin menunjukkan bahwa Polri masih mempunyai etika kesopanan ketika datang ke markas FPI dengan melakukan pengetukan pintu terlebih dahulu sebelum melaksanakan kegiatan pencopotan atribut FPI. Menurut McNair fungsi media komunikasi dalam masyarakat demokrasi yang sudah dipenuhi oleh kedua media

online tersebut adalah menginformasikan warga tentang apa yang terjadi di sekitar mereka, dan memberi edukasi mengenai makna dan signifikansi fakta.

Penelitian Silviah (2014) yang berjudul Strategi Humas Front Pembela Islam Dalam Memperbaiki Citra Publik melalui Media Massa. Pemberitaan di media massa mengenai kekerasan yang dilakukan oleh FPI, menghasilkan citra yang negative bagi FPI. Strategi yang dilaksanakan Humas FPI adalah mengkomunikasikan segala program dan kegiatan FPI baik internal maupun eksternal. FPI dalam melakukan kegiatan belum merumuskan suatu strategi. Kesimpulan dari penelitian tersebut strategi yang dilaksanakan oleh organisasi FPI belum terstruktur dengan baik terutama strategi untuk memperbaiki citra FPI yang negative dalam masyarakat (Silviah, 2014).

Pada penelitian Hendrian (2020), mengenai Konsep Amar Ma'ruf Nahi Munkar Front Pembela Islam dalam Kehidupan Demokrasi di Indonesia bertujuan mengkaji dan memahami secara komprehensif aksi sweeping yang dilakukan oleh FPI dan penegakan amar ma'ruf nahî munkar yang berujung pada kekerasan dengan masyarakat sekitar dalam kehidupan demokrasi di Indonesia. Penelitian ini menghasilkan kesimpulan sebagai berikut:

SIMPULAN

Dalam melakukan kegiatannya FPI sering melakukan tindak kekerasan dan dijadikan alat untuk mempolitisasi agama Islam, serta melawan pemerintahan yang sah. Kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan kekerasan dan melawan pemerintah yang sah antara lain sebagai berikut: FPI membenci orang yang tidak setuju dengan perbuatannya dengan mengatakan kafir, mengancam orang yang menurunkan baliho bergambar Rizieq Shihab, dan setiap demonstrasi FPI selalu diakhiri dengan kekerasan seperti pelemparan batu terhadap petugas kepolisian. Berkaitan dengan hal-hal tersebut, maka pemerintah melalui

(1) FPI hanya menegakkan kewajiban umat Islam dalam dakwah amar ma'rûf nahî munkar yang terwujud sebagai gerakan anti-maksiat. Hal ini bermaksud untuk menegakkan dakwah Islamiyyah dan mengkritisi lemahnya kontrol pemerintah dalam menegakkan hukum. (2) Penegakkan amar ma'rûf nahî munkar dalam kehidupan demokrasi konstitusi di Indonesia perlu memperhatikan kemaslahatan dalam koridor syari'at Islam dan kepatuhan kepada pemimpin sesuai hukum yang berlaku (Hendrian, 2020).

Kedua penelitian tersebut memberi atribut yang negative terhadap keberadaan FPI. Kekerasan dalam melaksanakan keinginannya menjadi ciri khas FPI. Hasil rekomendasi pada analisis framing penelitian ini adalah (1) Salah satu pertimbangan pembubaran dan penghentian kegiatan FPI adalah menjaga eksistensi ideologi dan konsensus dasar bernegara yaitu Pancasila, UUD 1945, keutuhan NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. (2) Pemerintah melarang aktivitas FPI dan akan menghentikan setiap kegiatan yang dilakukan FPI. Kedua rekomendasi tersebut sesuai dengan kesimpulan penelitian terdahulu yaitu FPI mempunyai citra yang negative di masyarakat.

Kementerian Dalam Negeri tidak memberikan ijin kepada organisasi masyarakat yang selalu meresahkan masyarakat luas. Ijin sebagai ormas tidak diberikan kepada FPI sebagai organisasi kemasyarakatan adalah sebuah langkah mundur dalam berdemokrasi. Pada dasarnya hak berorganisasi adalah hak konstitusional.

Jika tidak ada alasan yang mendasar, pembubaran terhadap sebuah organisasi kemasyarakatan seharusnya tidak ada. Namun, FPI memang sebuah organisasi yang menawarkan intoleransi dalam bidang keagamaan seperti misalnya akan membuat NKRI sebuah negara yang berdasarkan pada Islam. Aksi pembubaran FPI menunjukkan

sikap tegas negara untuk memerangi radikalisme berbasis kekerasan yang membahayakan masa depan demokrasi. Berdasarkan penelitian yang peneliti lakukan FPI adalah organisasi yang memaksakan kehendak dalam setiap kegiatannya dan menganggap pihak lain salah. Ini bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi adalah sebagai berikut menyelesaikan perselisihan dengan damai dan secara melembaga, menjamin terselenggaranya perubahan secara damai dalam suatu masyarakat yang sedang berubah, menyelenggarakan pergantian pimpinan secara teratur, membatasi pemakaian kekerasan sampai minimum, mengakui serta menganggap wajar adanya keanekaragaman, dan menjamin tegaknya keadilan. Dalam menjalankan fungsinya pemangku kepentingan harus melihat latar belakang FPI. FPI adalah organisasi kemasyarakatan dalam melaksanakan

kegiatan selalu mengganggu masyarakat pada umumnya. TNI akan siap sedia turun tangan apabila ada yang mengganggu kehidupan masyarakat. Setiap persoalan yang ada harus dilakukan secara hukum karena Negara Republik Indonesia berdasarkan pada hukum.

Komunikasi pembangunan merupakan dasar bagi perubahan social. Perubahan di sini sebagai perubahan ke arah lebih baik. Pembubaran FPI harus dilakukan sesuai prosedur hukum yang berlaku. Jika organisasi masyarakat FPI melakukan intoleransi, kekerasan, mengganggu ketertiban umum sehingga mengakibatkan warga yang lain atau bukan pengikut FPI menggunakan hak nya sebagai warga negara meminta pembubaran FPI harus tetap melalui pengadilan. Tidak bisa hanya berpegang pada keputusan eksekutif dalam hal ini yang menjalankan pemerintahan.

DAFTAR PUSTAKA

- Afriadi, Prianto, G. F., Ernungtyas, N. F., Irwansyah, & Afriani, A. L. (2019). Komunikasi Politik "Rasa" Ala Jokowi Dalam Merespon Politik Sentimen. *Wacana: Jurnal Ilmiah Ilmu Komunikasi*, 18 No 2, 142–153. <https://doi.org/10.32509/wacana.v18i2.928>
- Akhrani, L. A. (2018). Front Pembela Islam: Menggali akar konflik beragama ditinjau dari fanatisme agama, prasangka agama dan intensi konflik. *Fenomena*, 27(1), 40–50. <https://doi.org/10.30996/fn.v27i1.1482>
- Djuyandi, S. I., & Yusa, D. (2017). *Pengantar Ilmu Politik*. Rajawali Pers.
- Duile, T. (2017). Islam, Politics, and Cyber Tribalism in Indonesia A Case Study on the Front Pembela Islam. *Iqas*, 48, 249–272.
- Eriyanto. (2012). *Analisis Framing* (p. 353). LKiS Yogyakarta.
- Faiz, F. (2017). FRONT PEMBELA ISLAM: Antara Kekerasan dan Kematangan Beragama. *Kalam*, 8(2), 347. <https://doi.org/10.24042/klm.v8i2.226>
- Hendrian, R. (2020). *Konsep Amar Ma'rûf Nahî Munkar Front Pembela Islam Dalam Kehidupan Demokrasi Di Indonesia*. (Skripsi). Fakultas Syari'ah Jurusan Siyasah Syar'iyah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Diakses dari: <http://repository.radenintan.ac.id/9192/1/Skripsi%20Ramada%20Hendrian.pdf>
- Kanwa. (2020). *Prinsip-prinsip Demokrasi*. <https://www.kompas.com/skola/read/2020/02/07/150000469/prinsip-prinsipdemokrasi?page=2>
- McNair, B. (2015). *Pengantar Ilmu Politik*. Nusa Media.
- Miriam, B. (2016). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Gramedia Pustaka Utama.

- Pranawukir, I. (2019). Pemberitaan Mengenai Polri Dalam Menghadapi Pemilu Serentak 2019 Pada Media Surat Kabar Online. *Wacana: Jurnal Ilmiah Ilmu Komunikasi*, 18(2), 154-168.
<https://doi.org/10.32509/wacana.v18i2.915>
- Romli, A. S. M. (2012). *Jurnalistik Online: Panduan Praktis Mengelola Media Online*. Nuansa Cendekia.
- Sambo, M. dkk. (2017). *Pengantar Jurnalisme Multiplatform*. Prenadamedia Group.
- Savitri, S. F. & Taher, A. (2018). FENOMENA PEMBERITAAN HOAX TERKAIT ISU AGAMA (Studi Perseteruan Ahok vs Front Pembela Islam (FPI) di Media Sosial Instagram). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FISIP Unsyiah*, 3(1), 1-11. Diakses dari: <http://jim.unsyiah.ac.id/FISIP/article/view/6223>
- Silviah, F. (2014). *Strategi Humas Front Pembela Islam Dalam Memperbaiki Citra Publik melalui Media Massa*. (Skripsi). Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam, Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Diakses dari: <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/43319/1/FITRI%20SILVIAH-FDK.pdf>
- Sobur, A. (2012). Analisis Teks Media. Rosda Karya.
- Wahid, A. H. (2018). Model Pemahaman Front Pembela Islam (FPI) Terhadap Al-Qur'an Dan Hadis. *Refleksi*, 17(1), 79-100.
<https://doi.org/10.15408/ref.v17i1.10199>